BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Nganjuk memiliki luas wilayah 2258,67 Ha yang sebagian besar terdiri dari kawasan permukiman seluas 882,71 Ha, pertanian seluas 1271.15 Ha dan Lahan Lain-lain seluas 104,81 Ha. Ketinggian dari permukaan laut ± 56 m dengan curah hujan rata-rata per tahun 1.260 mm.

Secara administratif, Kecamatan Nganjuk terdiri dari 13 Kelurahan dan 2 desa yaitu:

1. Kelurahan Jatirejo
2. Kelurahan Begadung
3. Kelurahan Bogo
4. Kelurahan Cangkringan
5. Kelurahan Ganungkidul
6. Kelurahan Kartoharjo
7. Kelurahan Kauman
8. Kelurahan Kramat
9. Kelurahan Mangundikaran
10. Kelurahan Payaman
11. Kelurahan Ploso
12. Kelurahan Ringinanom
13. Kelurahan Werungotok
14. Desa Kedungdowo
15. Desa Balongpacul

Adapun luas masing-masing desa dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1

LUAS WILAYAH KECAMATAN NGANJUK PER KELURAHAN/DESA

No	Kelurahan/Desa	Luas (Ha)
1.	Jatirejo	1,98
2.	Begadung	2,17
3.	Bogo	0,84
4.	Cangkringan	0,82
5.	Ganungkidul	8,76
6.	Kartoharjo	1,03
7.	Kauman	3,23
8.	Kramat	2,49
9.	Mangundikaran	1,84
10.	Payaman	0,27
11.	Ploso	0,78
12.	Ringinanom	8,13
13.	Werungotok	2,92
14.	Kedungdowo	2,36
15.	Balongpacul	1,68
	Jumlah	2.716,35

Sumber data : Profil Kecamatan Nganjuk Tahun 2024

Secara geografis Kecamatan Nganjuk berbatasan dengan :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Loceret dan Berbek
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Berbek dan Bagor
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Rejoso dan Gondang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sukomoro

Data Demografi Penduduk di Kecamatan Nganjuk

No	Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Jatirejo	2.820	2.809	5.629
2.	Begadung	3.766	3.758	7.524
3.	Bogo	1.532	1.631	3.163
4.	Cangkringan	1.298	1.260	2.558
5.	Ganungkidul	1.572	1.707	3.279
6.	Kartoharjo	2.704	2.743	5.443
7.	Kauman	2923	3069	6003
8.	Kramat	3586	3628	7214
9.	Mangundikaran	3424	3628	3424
10.	Payaman	1.593	1.565	3.158
11.	Ploso	3.424	3.286	6.710
12.	Ringinanom	1039	1046	2085
13.	Werungotok	3258	3359	6617
14.	Kedungdowo	2.294	2.101	4.395
15.	Balongpacul	992	999	1.991
	Jumlah Penduduk	36.225	36.589	69.193

Sumber data : Profil Kependudukan Kecamatan Nganjuk Tahun 2024

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dari Kecamatan Nganjuk.

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk yaitu: menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi:

a. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

b. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
c. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
e. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
f. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
g. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
i. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

3. Struktur Organisasi

Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan pada Pasal 4 ayat 2 huruf e disebutkan bahwa Kecamatan Nganjuk adalah Kecamatan dengan Tipe A.

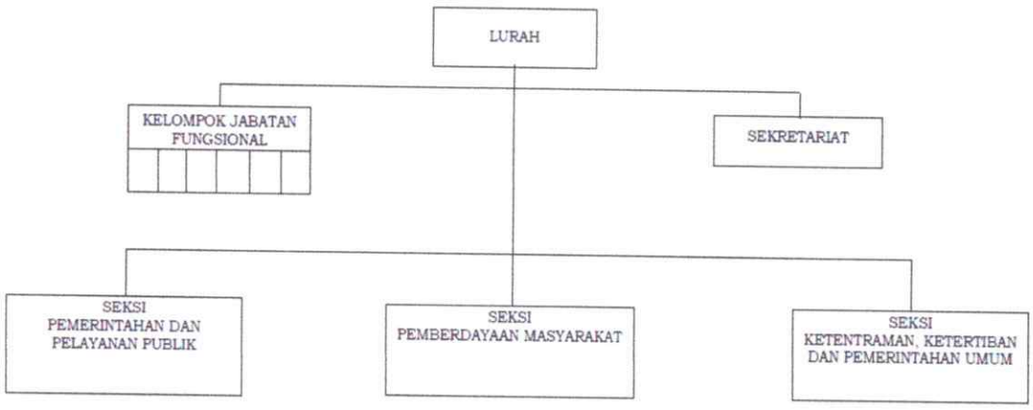
Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN NGANJUK KABUPATEN NGANJUK



Sumber : Peraturan Bupati Nganjuk nomor 6 Tahun 2022

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN
KECAMATAN NGANJUK KABUPATEN NGANJUK



Sumber : Peraturan Bupati Nganjuk nomor 6 Tahun 2022

Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Camat adalah:

1. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
3. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
4. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
5. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
6. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
7. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
8. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
9. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan

Sekretariat mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis;
2. pengelolaan urusan keuangan;
3. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
4. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

   1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

   Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

   a) melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;

b) melaksanakan pengelolaan keuangan;
c) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a) mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
b) mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
c) mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
d) melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
e) melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
f) melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya.

c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

a. melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
b. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
c. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
d. melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
e. melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
f. melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;

g. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
i. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
j. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a. melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
b. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
c. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
d. melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
f. melaksanakan evaluasi Kelurahan; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

Seksi Ketentraman Ketertibandan Pemerintahan Umum mempunyai tugas :

a. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945,

pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;

b. melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
c. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
d. melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara RI;
e. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
f. melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
g. melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
h. melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
j. melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakankewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertrikal;
k. melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

a. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;

b. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
c. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
d. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f. melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
g. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa ;
h. melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
i. melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
j. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
k. melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
l. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
m. melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
n. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan
o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Kelurahan

Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah, serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelurahan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. pemberdayaan masyarakat;
c. pelayanan masyarakat;
d. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugasnya.

1) Sekretariat Kelurahan

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan ketatausahaan, pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a) penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan di kelurahan;
b) pengelolaan urusan keuangan;
c) pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
d) pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah yang berkaitan dengan tugasnya.

2) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas dan fungsi

a) melaksanakan kegiatan pemerintahan;
b) melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di kelurahan;
c) melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
d) melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas dan Fungsi :

a) melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kelurahan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan;
b) melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang di wilayah kerja kelurahan;
c) melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan;
d) melaksanakan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan;
e) melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan; dan
f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Seksi Ketenteraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum Kelurahan

Seksi Ketenteraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum mempunyai tugas :

a. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
b. melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kelurahan;
c. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;

d. melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;

e. melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku, dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;

f. melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;

h. melaksanakan pembinaan di bidang ketenteraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat dan urusan Pemilihan Umum (Pemilu) serta pembinaan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW); dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Nganjuk adalah sebagai berikut:

1.1 Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Nganjuk telah terisi sebanyak 8 orang dari 8 jabatan struktural yang ada serta dibantu oleh 4 orang Pelaksana/staf. Untuk pejabat di Kelurahan sejumlah Lurah Sebanyak 13 Orang, Sekretaris Sebanyak 12 orang, Kasi Kelurahan 15 Orang Pelaksana 14 orang dan Non ASN 84 orang. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Pegawai Pada Kecamatan Nganjuk
Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

No.	Nama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Camat	1	-	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1	-	1
3.	Kepala Seksi	2	2	4
4.	Kasubbag	1	1	2
5.	Lurah	12	1	13
6	Sekretaris Kelurahan	8	4	12
7.	Kepala Seksi Kelurahan	10	5	15
5.	Pelaksana/PNS	15	6	21
6.	Non ASN Kecamatan	6	2	8
7.	Non ASN Jatirejo	6	2	8
8.	Non ASN Begadung	5	1	6
9.	Non ASN Bogo	6	2	8
10.	Non ASN Cangkringan	5	2	7
11.	Non ASN Ganungkidul	6	1	7
12.	Non ASN Kartoharjo	5	3	8
13.	Non ASN Kauman	5	2	7
14	Non ASN Kramat	9	-	9
15.	Non ASN Mangundikaran	3	2	5
16	Non ASN Payaman	1	2	3
17.	Non ASN Ploso	6	1	7
18	Non ASN Ringinanom	3	4	7
19.	Non ASN Werungotok	5	3	8
Jumlah		119	42	161

Sumber data : Data Kepegawaian Kecamatan Nganjuk Tahun 2024

1.2. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Nganjuk sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Pegawai Pada Kecamatan Nganjuk
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2025

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Pegawai
1.	Pembina Tk.I	IV/b	1		1
2.	Pembina	IV/a	1		1

3.	Penata Tingkat I	III/d	18	7	25
4.	Penata	III/c	6	6	12
5.	Penata Muda Tk. I	III/b	8	6	14
6.	Pengatur Tk. I	II/d	8	7	15
7.	Pengatur	II/c	3	6	9
8.	Pengatur Md Tk.I	II/b	3	4	7
Jumlah			48	36	84

Sumber data : Data Kepegawaian Kecamatan Nganjuk Tahun 2024

1.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pegawai Kecamatan Nganjuk dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikat sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Nganjuk
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2025

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S2	7	4	7
2.	S1	7	25	32
3.	SMA	6	17	23
4.	SMP	1		1
	JUMLAH	21	42	63

Sumber data : Data Kepegawaian Kecamatan Nganjuk Tahun 2024

2. Sarana Dan Peralatan Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja yang mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi :

1. Tanah untuk Kantor
2. Gedung Kantor 1 (satu) unit yang digunakan untuk kegiatan administrasi pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat:
3. Sarana alat transportasi yang meliputi :

- Roda empat 1 (satu) buah terdiri dari :
  - 1 unit Toyota Veloz Tahun 2024 dengan system sewa
- Roda dua 6 (enam). Unit terdiri dari :
  - 1 unit Yamaha Vision Tahun 2014
  - 1 unit Honda Kharisma Tahun 2011
  - 2 Honda Win (Desa Kedungdowo dan Balongpul)
  - 2 Honda Versa (Desa Kedungdowo dan Balongpacul)

4. Peralatan inventaris kantor lainnya berupa dalam kondisi baik dan layak digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

Meja Kerja	: 8 buah
Meja Panjang	: 2 buah
Kursi	: 11 buah
Kursi Rapat	: 50 buah
Bangku Panjang /tunggu	: 4 buah
Komputer khusus KTP SIAK	: 1 (satu) unit Rusak
Komputer e-KTP	: 2 unit (depdagri) Rusak
Laptop	: 7 (tujuh) unit
Komputer	: 9 (sembilan) 3 Rusak
Printer	: 13 unit 7 rusak
Telepon	: 1 (satu) unit
Lemari Besi	: 3 (tiga) unit
Rak Kayu	: 5 (lima) unit 3 rusak
Filing besi	: 6 (enam) unit 4 rusak
Filing Kayu	: 2 (dua)
Brangkas	: 2 (dua) unit 1 rusak
Lemari Slorok	: 2 (dua) unit
Papan visuil	: 2 (dua) unit
Lcd Proyektor	: 1 (dua) unit
Lemari kayu	: 4 (empat) unit
Ac	: 8 (delapan)
Telivisi	: 3 (Tiga) unit 2 rusak
Sound system	: 3 (Tiga) set 1 rusak
Werles	: 1 (satu) rusak

Power suply	: 1 (satu) rusak
Mimbar Podium	: 1 (satu)
Printer	: 9 (sembilan) Unit 5 rusak

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Nganjuk dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik di Kecamatan
2. Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan
3. Prosentase kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan yang dilaksanakan
4. Prosentase kegiatan koodinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan
5. Prosentase warga/masyarakat yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan
6. Prosentase kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel 2.5 dengan format sebagai berikut :

Tabel 2.5.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada tahun			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Indeks Sinergitas Kecamatan	-	-	85,58	85,58	85,58	85,58	85,6	85,9	86,2	86,7	95	96	97	98
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	-	-	80	82	84	86	78,64	80,03	86,09	86,09	98	97	95	93
3	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Prosentase kegiatan koodinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Prosentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan		-	100	100	- 100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Prosentase kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Laporan Evaluasi Renstra PD Tahun 2018-2023 Beserta Perubahannya Sampai Tahun 2024

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dari Tabel 2.6, kita dapat mengetahui bahwa pada semua target telah terpenuhi. Target yang terpenuhi adalah terjadi karena dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak dan stakeholder di Kecamatan Nganjuk. Untuk Analisis Capaian Kinerja Kecamatan Nganjuk pada Tahun Anggaran 2024 seperti dijelaskan pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.7

Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (%)
1	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1			85,58	86,70	101%
2	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai SAKIP Kecamatan Nganjuk**	86,09	89,27	104%
3	**Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100%	100%	100%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	8 Laporan	8 Laporan	100%
5	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	100%	100%	100%
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji yang dibayarkan	85 orang x 12	85 orang x 12	100%

7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100%
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun Perangkat Daerah yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	100%
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran Perangkat Daerah yang disusun	2 Laporan	2 Laporan	100%
10	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya**	20 Paket	0	0
11	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase fasilitasi dan koordinasi bagian umum yang dilaksanakan perangkat daerah**	100%	78,57%	78,57%
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	1 Paket	1 paket	100%
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK dan mamin pegawai dan alat kebersihan yang tersedia	12 Paket	12 Paket	100%
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket yang disediakan	1 Paket	1 paket	100%
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	12 Laporan	12 Laporan	100%
16	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	2 Laporan	1 Laporan	50%
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN yang melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Laporan	12 Laporan	100%

18	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang dikelola dengan baik	1 dokumen	1 dokumen	100%
19	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	100%	100%	100%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daera SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
20	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase barang milik daerah SKPD yang diadakan**	100%	100%	100%
21	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	1 paket	1 paket	100%
22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan	3 Unit	3 unit	100%
23	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**	100%	100%	100%
24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa paket/pengiriman surat menyurat	1 Laporan	1 laporan	100%
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi dan listrik yang tersedia	4 Laporan	4 Laporan	100%
26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	100%
27	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah SKPD yang dipelihara**	100%	75,56%	75,56%
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat	3 Unit	3 Unit	100%
29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	15 Unit	4 Unit	

					26,67%
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terawat	1 Unit	1 Unit	100%
31	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Tingkat kegiatan pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan tertib**	100%	87,59%	87,59%
32	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	2 Laporan	2 Laporan	100%%
33	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi / sinergi perencanaan.	2 Laporan	2 Laporan	100%
34	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	1 dokumen	0 dokumen	0%
35	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah dokumen kegiatan bidang sarana dan prasarana Pelayanan Umum yang tersusun	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
36	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan**	4 Laporan	4 Laporan	100 %
37	Pelaksaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah warga yang mendapat pelayanan	4 Laporan	4 Laporan	100%
38	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan**	100%	100%	100%
39	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang**	100%	100%	100%

		dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			
40	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan	Jumlah Dokumen Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
41	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	100%	100%	100%
42	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi masyarakat dalam musrenbangkel	5 Lembaga Kemasy	5 Lembaga Kemasy	100%
43	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarpras yang terbangun	3 Unit	3 unit	100%
44	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masy di Kelurahan	2 Pokmas	2 pokmas	100%
45	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani**	30%	30%	100%
46	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah laporan hasil koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	12 Laporan	12 Laporan	100%
47	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas dengan kepolisian dan TNI	12 Laporan	12 Laporan	100%
48	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan**	100%	80%	80%

		pemerintahan di Kecamatan			
49	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan**	75 orang	45 orang	80%
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Pemantapan Pengamanan Pancasila Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinika Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan	75 orang	45 orang	80%
50	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa/ Kelurahan cepat berkembang**	95%	95%	100%
51	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	100%	100%	100%
52	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	2 Dokumen	2 dokumen	100%
53	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen kegiatan fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Sumber : LKjIP Kecamatan Nganjuk Tahun 2024

Tabel 2.8

Tabel Data Fasilitas Pendidikan Formal dan Non Formal di Kecamatan Nganjuk

No	Kelurahan/Desa	PAUD/TK	SD/MI	SMP/MTS	SMA/MA	Perguruan Tinggi	Ponpes	Pendidikan Kesetaraan	Kelompok Belajar/Pamong Belajar	Perpustakaan
1.	Jatirejo	4	5	1	1	-	2	-	-	1 Aktif
2.	Begadung	4	4	2	3	-	-	-	-	1 Tidak Aktif
3.	Bogo	13	2	1	1	-	1	-	-	-
4.	Cangkringan	1	1		1	-	-	-	-	-
5.	Ganungkidul	5	4	2	1	-	-	-	-	1
6.	Kartoharjo	4	2	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kauman	4	3	-	4	3	2	-	-	
8.	Kramat	5	3	2	3	1	-	-	-	1 Tidak Aktif
9.	Mangundikaran	2	3	1	2	0	1	-	-	1 Aktif
10.	Payaman	2	4	2	1	-	1	-	-	1 Aktif
11.	Ploso	2	4	0	1	0	4	-	-	0
12.	Ringinanom	2	1	-	-	-	1	-	-	1 Tidak aktif
13.	Werungotok	3	2	-	-	-	1	-	-	1 Tidak Aktif
14.	Kedungdowo	1	1	-	-	-	-	-	-	-
15.	Balongpacul	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH									

Sumber Data : Desa/Kelurahan

Tabel Data Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Nganjuk

No	Kelurahan/Desa	Rumah Sakit	Puskesmas	Klinik	Pustu	Polindes	Apotik
1.	Jatirejo	-	-	-	1	-	5
2.	Begadung	-	1	-	-	-	2
3.	Bogo	-	-	-	-	1	3
4.	Cangkringan				1		
5.	Ganungkidul	-	-	-	-	1	-
6.	Kartoharjo	-	-	1	-	1	1
7.	Kauman	2	-	-	-	1	5
8.	Kramat	-	-	-	-	1	1
9.	Mangundikaran	0	0	1	0	1	3
10.	Payaman	1	-	-	1	1	4
11.	Ploso	0	0	2	0	1	1
12.	Ringinanom	-	-	-	-	1	
13.	Werungotok	-	-	-	-	1	1
14.	Kedungdowo	-	-	-	-	1	-
15.	Balongpacul	-	-	-	1	-	-
	JUMLAH	**3**	**1**	**4**	**4**	**11**	**26**

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan pelayanan Publik

Tabel Data Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Nganjuk

No	Kelurahan/Desa	RT	RW	BPD	LPM	Posyandu	Karang Taruna	Linmas (orang)
1.	Jatirejo	43	9	-	11	31	5	20
2.	Begadung	22	6	-	1	8	1	31
3.	Bogo	28	5	-	1	8	1	10
4.	Cangkringan	16	6		1	5	1	21
5.	Ganungkidul	20	4	-	1	6	1	20
6.	Kartoharjo	23	6		1	7	1	30
7.	Kauman	25	5		1	5	1	30
8.	Kramat	44	11	-	11	6	1	32
9.	Mangundikaran	40	8	0	1	8	1	31
10.	Payaman	28	10	-	1	9	1	31
11.	Ploso	35	7	0	13	3	1	15
12.	Ringinanom	15	4	-	1	4	1	15
13.	Werungotok	44	7	-	1	7	1	30
14.	Kedungdowo	28	7	7	9	5	29	30
15.	Balongpacul	6	3	5	1	2	2	33
	JUMLAH	**417**	**98**	**12**	**55**	**114**	**48**	**379**

Sumber Data : Seksi PMD

Tabel Data Lembaga Ekonomi Kelurahan/Desa di Kecamatan Nganjuk

No	Kelurahan/Desa	BUMDesa	Bumdesma	Pasar	Koperasi	Kopwan	LKM (Kelurahan)
1.	Jatirejo	-	-	1	1	1	1
2.	Begadung	-	-	-	2	1	1
3.	Bogo	-	-	-	-	1	-
4.	Cangkringan	-	-	-	-	1	1
5.	Ganungkidul	-	-	-	3	1	1
6.	Kartoharjo	-	-	-	-	1	1
7.	Kauman	-	-	-	4	1	
8.	Kramat	-	-	-	2	1	-
9.	Mangundikaran	0	0	1	1	1	1
10.	Payaman	-	-	2	-	1	-
11.	Ploso	0	0	0	0	0	0
12.	Ringinanom	-	-	-	-	1	-
13.	Werungotok	-	-	-	-	-	-
14.	Kedungdowo	1	-	-	-	-	-
15.	Balongpacul	0				1	
	JUMLAH	**1**	**0**	**4**	**13**	**12**	**6**

Sumber Data : Seksi PMD

Tabel Data Infrastruktur Desa/Kelurahan di Kecamatan Nganjuk

No	Kelurahan/Desa	Jalan (km)	Jembatan (unit)	Drainase (km)	Embung
1.	Jatirejo	15	2	8	-
2.	Begadung	12	7	8	-
3.	Bogo	7	5	6	-
4.	Cangkringan	7	1	4	-
5.	Ganungkidul	11	5	9	-
6.	Kartoharjo	16	3	10	-
7.	Kauman	14	9	10	-
8.	Kramat	25	2	20	-
9.	Mangundikaran	15,3	0	11,2	1
10.	Payaman	10	2	5	-
11.	Ploso	156,8	3	125	0
12.	Ringinanom	3	3	7	1
13.	Werungotok	11	4	5	-
14.	Kedungdowo	14	2	11,7	-
15.	Balongpacul		1		
	JUMLAH	**317,1**	**49**	**239,9**	**2**

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tabel Data Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Nganjuk :

No	Kelurahan/Desa	LSM	Organisasi Masyarakat	Organisasi Profesi	Organisasi Keagamaan
1.	Jatirejo	-	3	-	3
2.	Begadung	2		-	2
3.	Bogo	-	-	-	-
4.	Cangkringan		1		1
5.	Ganungkidul	1	3	-	4
6.	Kartoharjo	-	-	-	2
7.	Kauman	-	-	-	2
8.	Kramat	-	-	-	1
9.	Mangundikaran	2	4	2	3
10.	Payaman	-		-	1
11.	Ploso	0	0	0	0
12.	Ringinanom		1	-	-
13.	Werungotok	-	-	-	2
14.	Kedungdowo	-	-	-	2
15.	Balongpacul	1			
	JUMLAH	**4**	**12**	**2**	**23**

Sumber Data : Seksi Trantibum

Tabel Data Jumlah Gangguan Trantibum di Kecamatan Nganjuk Tahun 2024

No	Kelurahan/Desa	Anjal / gepeng	minuman beralkohol	Galian Minerba	Penertiban Reklame	Penertiban PKL	Penertiban IMB	Perkalahian
1.	Jatirejo	-	-	-	-	-	-	1
2.	Begadung	-	1	-	-	-	-	-
3.	Bogo	-	-	-	-	-	-	-
4.	Cangkringan	-	-	-	-	-	-	-
5.	Ganungkidul	1	-	-	-	-	-	-
6.	Kartoharjo	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kauman	1	-	-	-	-	-	-
8.	Kramat	-	-	-	-	-	-	-
9.	Mangundikaran	4	6	0	8	4	0	0
10.	Payaman	-	-	-	-	-	-	-
11.	Ploso	0	0	0	0	1	2	2
12.	Ringinanom	-	-	-	-	-	-	-
13.	Werungotok	-	-	-	-	-	-	-
14.	Kedungdowo	-	-	-	-	-	-	-
15.	Balongpacul	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH							

Sumber Data : Seksi Trantibum

Tabel Data konflik sosial di Kecamatan Nganjuk Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Konflik social di Kec. Nganjuk
0.	Kec. Nganjuk	-
1.	Jatirejo	-
2.	Begadung	-
3.	Bogo	-
4.	Cangkringan	-
5.	Ganungkidul	-
6.	Kartoharjo	2
7.	Kauman	-
8.	Kramat	-
9.	Mangundikaran	-
10.	Payaman	-
11.	Ploso	3
12.	Ringinanom	-
13.	Werungotok	1
14.	Kedungdowo	-
15.	Balongpacul	-

Sumber Data : Seksi Trantibum dan Pemerintahan Umum

Tabel Data Pembinaan desa dan kelurahan di Kecamatan Nganjuk Tahun 2024

No	Desa	RPJMDesa (Jumlah Dokumen)	RKPDesa (Jumlah Dokumen)	APBDesa (Jumlah Dokumen)	LPPDes (Jumlah Dokumen)	LKPDes (Jumlah Dokumen)	IPPDes (Jumlah Dokumen)	RKA Kelurahan (Jumlah Dokumen)	Laporan Keuangan Kelurahan (Jumlah Dokumen)
1.	Jatirejo	-	-	-	-	-	-	2	12
2.	Begadung	-	-	-	-	-	-	2	12
3.	Bogo	-	-	-	-	-	-	2	12
4.	Cangkringan	-	-	-	-	-	-	2	12
5.	Ganungkidul	-	-	-	-	-	-	2	12
6.	Kartoharjo	-	-	-	-	-	-	2	12
7.	Kauman	-	-	-	-	-	-	2	12
8.	Kramat	-	-	-	-	-	-	2	12
9.	Mangundikaran	0	0	0	0	0	0	7	1
10.	Payaman	-	-	-	-	-	-	2	12
11.	Ploso	0	0	0	0	0	0	2	2
12.	Ringinanom	-	-	-	-	-	-	2	12
13.	Werungotok	-	-	-	-	-	-	2	12
14.	Kedungdowo	1	2	2	1	1	1	-	-
15.	Balongpacul	1	2	2	1	1	1	-	-
	JUMLAH	**2**	**4**	**4**	**2**	**2**	**2**	**31**	**135**

Sumber Data : Seksi Binwas

Tabel Data Jenis Pelayanan Paten di Kecamatan Nganjuk Tahun 2024

No	Jenis pelayanan	Tahun 2024
1.	Adminduk capil	12
2.	Perijinan	12
3.	Administrasi lainnya	12

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tabel Data Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Nganjuk Tahun 2024

No	Jenis pelayanan	Tahun 2024
1	Kecamatan Sehat	1
2	Kecamatan Layak Anak	1
3	Pengarusutamaan dan Kesetaraan Gender	1
4	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	1
5	Fasilitasi dan Koordinasi Pemungutan PBB	1
6	Kemiskinan	1

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan layanan publik

b) Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Nganjuk adalah masyarakat dan desa/kelurahan di Kecamatan Nganjuk.

c) Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan

Mitra Kecamatan Nganjuk dalam pemberian layanan adalah Koramil dan Polsek sebagai mitra kecamatan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum, yang bertugas :

a. Koordinasi dan fasilitasi Ketentraman dan ketertiban

2.6. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Nganjuk menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/*Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

1) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020. Dalam Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Nganjuk;

2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3) Pola kerja di Kecamatan Nganjuk yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
6) SDM Aparatur Kecamatan yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
2) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
3) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan.
4) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata dengan baik;
2) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain, Koramil, Polsek dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat;
4) serta masyarakat yang aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2) Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.

Identifikasi permasalahan disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Belum optimalnya sinergi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	• Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih kurang; • Belum optimalnya akuntabilitas kinerja kecamatan	• Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan publik • Kekurang selarasan antara perencanaan dan penganggaran dengan pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Belum efektifnya koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantibum	• Hubungan kelembagaan antar perangkat daerah belum efektif • Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan • Keterbatasan kewenangan Camat dalam pembinaan pemerintahan Desa
		Penerapan atau implementasi tertib administrasi desa yang belum optimal.	• Kurang tertibnya administrasi pemerintahan desa

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Nganjuk, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat Daerah perlu untuk memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakehoders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

2.7. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada Subbab 3.1 sudah dijelaskan mengenai Permasalahan-permasalahan yang muncul pada Pelayanan Perangkat Daerah khususnya Kecamatan Nganjuk, yang ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah.

Dengan demikian, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai isu-isu strategis pada Kecamatan Nganjuk, yaitu:

1) *Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.* Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;

2) *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.* Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan.

3) *Pelayanan Prima.* Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4) *Peningkatan Sinergitas Kecamatan.*

Peningkatan sinergitas kecamatan mendorong kesinambungan organisasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar pemerintahan di wilayah Kecamatan Nganjuk guna mempercepat pelaksanaan pembangunan. Serta mengembangkan berbagai kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan program pembangunan guna peningkatan kesejateraan masyarakat. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

TABEL TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS KECAMATAN NGANJUK

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan	Peningkatan ekonomi lokal, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjuta	Ketahanan terhadap perubahan iktim, kerusakan dan penumnan kualitas lingkungan, serta keberlanjutan sumber daya alam	Konflik bersenjata, ancaman lingkungan seperti perubahan iklim dan cuaca ekstrem, diinformasi dan polarisasi sosial, ketimpangan ekonomi dan potensi kemerosotan ekonoimi global	Pengentasan kemiskinan ekstrem, pengembangan infrastruktur dan digitali desa, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan, pencegahan dan penanganan stunting serta penguatan BUMDes yang berkelanjutan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruKur antarwilayah, penanggulangan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi lokal	• Pemanfaatan ruang kebiiakan penyerahan Sebagian dari kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat di bidang Pemerintahan/Pembangunan untuk mendayagunakan potensi yang ada di wilayah, • Optimalisasi peran serta dan partisipasi Masyarakat dan kalangan dunia usaha dan swasta di Wilayah • Pelayanan Pima • Peningkatan Sinergitas Kecamatan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra PD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, tugas utama Camat adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Berdasarkan tugas utama kecamatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 - 2029, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Nganjuk dalam 3 (tiga) tahun ke depan dapat ditetapkan mendukung sasaran pembangunan daerah **"Meningkatkan reformasi birokrasi yang akuntabel".**

Adapun ***Tujuan*** Kecamatan Nganjuk adalah *Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan*, yang diukur dengan Indikator Kinerja Tujuan yaitu berupa *Indeks Sinergitas di Kecamatan.*

Tujuan jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 3.1. berikut:

TABEL 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RENSTRA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Nganjuk											
- Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan		Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)	86,70	86,80	86,90	87,00	87,10	87,20	87,30	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)	89,27	89,3	89,35	89,4	89,45	89,5	89,55	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)	30	28	27	26	25	24	22	
		Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	95	95	96	97	98	99	100	

3.2 Strategi Perangkat Daerah

Adapun strategi atau teknik untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh pimpinan Kecamatan Nganjuk dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di kecamatan dan di desa/kelurahan antara lain :

a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
b. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib
c. Melakukan pembinaan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang berkelanjutan

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Sedangkan Arah kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kecamatan Nganjuk, selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, serta evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah
3. Meningkatkan pengendalian intern perangkat daerah
4. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemungutan PBB
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
7. Meningkatkan koordinasi dan sinergi tiga pilar untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas keamanan wilayah
8. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan
9. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan Kepala Daerah
10. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penanganan kemiskinan daerah, pengarusutamaan dan kesetaraan gender, kecamatan layak anak, Kecamatan Sehat.
11. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pendampingan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan desa
12. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemilihan dan pelantikan kepala desa, perangkat desa BPD dan LPM

Berikut rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan RPD : Meningkatnya tata Kelola pemerintahan daerah yang baik			
Sasaran RPD : Meningkatkan Birokrasi yang akuntabel dan efektif serta pelayanan publik yang prima			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan	▪ Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	▪ Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan ▪ Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, serta evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah ▪ Meningkatkan pengendalian intern perangkat daerah ▪ Meningkatkan Layanan Kesehatan Masyarakat dan Pengadaan Mobil Siaga Kelurahan
		▪ Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa/Kelurahan serta Ketentraman dan Ketertiban	▪ Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemungutan PBB ▪ Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa ▪ Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
		▪ Melakukan pembinaan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang berkelanjutan	▪ Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pendampingan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan desa ▪ Meningkatkan koordinasi dan

			fasilitasi pemilihan dan pelantikan kepala desa, perangkat desa BPD dan LPM ▪ Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan ▪ Peningkatan ADD dan Kesejahteraan Kelembagaan Desa / Kelurahan (RT, RW, BPD/ LPM dan Kader)
	Meningkatnya Kententraman dan ketertiban Umum di kecamatan	▪ Melakukan koordinasi dengan tiga pilar dan memfasilitasi wawasan kebangsaan	▪ Meningkatkan koordinasi dan sinergi tiga pilar untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas keamanan wilayah ▪ Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan ▪ Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan Kepala Daerah ▪ Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penanganan kemiskinan daerah, pengarusutamaan dan kesetaraan gender, kecamatan layak anak, Kecamatan Sehat, UKS tingkat kecamatan.

Arah kebijakan dimulai dari Visi dan Misi Bupati Nganjuk. Yang dimaksud dengan Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi tersebut harus bersifat dapat dibayangkan (imaginable), diinginkan oleh segenap pemangku kepentingan (desirable), memungkinkan untuk dicapai (reachable), focus

pada masalah utama yang bersifat jangka panjang dan dapat dikomunikasikan (communicable) serta dapat dimengerti oleh seluruh pemangku kepentingan (understandable). Disamping itu, visi harus dapat memberdayakan dan memberikan motivasi dalam mengaktualisasikan tugas kepemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Adapun Visi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah

"MEWUJUDKAN KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT"

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan kebijakan dan strategi pencapaian tujuan. Misi akan digunakan oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai pemandu dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan dan pengambilan keputusan. Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 - 2029 dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan sektor - sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Nganjuk yang mandiri.

Adapun misi Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban;
2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan;
3. Mewujidkan percepatan pembangunan infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
4. Meningkatkan kualitas, pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
5. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi local;
6. Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata serta sektor produktif lain, melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna;

7. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan local.

Sedangkan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 antara lain :

3.1 Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan saluran
3.2 Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi
3.3 Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
3.4 Peningkatan akses dan kualitas Pendidikan
3.5 Penguatan pendidikan diniyah dan pesantren
3.6 Peningkatan layanan kesehatan masyarakat dan pengadaan mobil siaga kelurahan
3.7 Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai destinasi wisata
3.8 Optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional
3.9 Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai agropolitan
3.10 Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
3.11 Melestarikan seni budaya dan kearifan lokal serta lingkungan hidup
3.12 Revitalisasi bidang peternakan dan pertanian serta subsidi pupuk
3.13 Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif, UMKM
3.14 Pengembangan jejaring antar daerah kabupaten, kota, provinsi dan pusat serta warga Nganjuk di perantauan
3.15 Peningkatan ADD dan kesejahteraan kelembagaan desa atau kelurahan (RT, RW, BPD/LPM dan kader)

Kecamatan Nganjuk sebagai pelaksana terdepan bidang pemerintahan sebagai kepanjangantangan dari Bupati dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Kecamatan Nganjuk dapat berperan serta dan aktif melalui kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan di misi ke-2 (dua) yakni Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

Selain itu Kecamatan Nganjuk juga berperan aktif dalam misi ke-6 (enam) yaitu Peningkatan layanan kesehatan masyarakat dan pengadaan mobil siaga kelurahan, untuk pengadaan mobil siaga kelurahan, ada 13 Kelurahan yang ada di Kecamatan Nganjuk yang akan melaksanakan

pengadaan mobil operasional/ lapangan yakni mobil siaga, untuk pelaksanaan menunggu aturan kebijakan yang mengatur.

Selanjutnya Kecamatan Nganjuk juga berperan aktif dalam misi ke-15 (limabelas) yakni Peningkatan ADD dan kesejahteraan kelembagaan desa atau kelurahan (RT, RW, BPD/LPM dan kader). Peningkatan kesejahteraan dengan menambah honor yang lebih layak bagi kelembagaan kelurahan.

Disamping itu sebagai aparatur terdepan memungkinkan dalam pelaksanaannya, Kecamatan Nganjuk memberikan kontribusi lebih terhadap misi-misi lainnya dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang melesat maju dan bermartabat.